

**Implementasi Kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Desease-19  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Rawas Utara*****Implementation of Policy Village Deal with Corona Virus Disease-19  
in Legal Areas Musi Resort Police North Rawas*****Lishapsari Prihatini <sup>1)</sup>, Mardianto <sup>2)</sup> Eko Sumaryanto <sup>3\*)</sup>**<sup>1</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia\*E-mail : [ekodemaks@gmail.com](mailto:ekodemaks@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan komprehensif tentang implementasi Kebijakan Desa Corona Virus Disease-19 di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara. Desa Tangkal merupakan desa yang warganya dapat bergotong royong secara mandiri untuk mencegah penyebaran Covid-19. Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo merupakan desa percontohan pertama di Kabupaten Musi Rawas (Muratara) Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang alat utamanya adalah observasi, dan wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur. Temuan penelitian ini adalah: Implementasi Kebijakan Desa Corona Virus Disease-19 di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara dalam Kategori Baik. Tujuan keberadaan Kampung Tangguh tidak hanya untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi juga memiliki efek mengurangi kriminalitas. Indikator dan strategi kekuatan minat peserta program desa Tangkal Corona. Viral Disease-19 Polres Musi di Wilayah Hukum Rawas Utara, karena kepala desa adalah penguasa desanya, aktor utamanya adalah kepala desa, dimana strateginya memanipulasi semua sektor masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri .

**Kata kunci** : Implementasi, Kampung Tangkal Korona, *Corona Virus Desease-19***ABSTRACT**

*This study aims to obtain a comprehensive and comprehensive picture of the implementation of the Corona Virus Disease-19 Village Policy in the Legal Area of the North Musi Rawas Police. Tangkal Village is a village where residents can work together independently to prevent the spread of Covid-19. Rantau Kadam Village, Karang Dapo District, is the first pilot village in North Musi Rawas (Muratara) Regency. This type of research is qualitative research, whose main tool is observation, and interviews are conducted in an open and unstructured manner. The findings of this study are: Implementation of the Corona Virus Disease-19 Village Policy in the Legal Area of the North Musi Rawas Police Station in the Good Category. The purpose of the existence of Tangguh Village is not only to prevent the spread of the corona virus, but also to have the effect of reducing crime. Indicators and strategies for the strength of interest in the Tangkal Corona village program. Viral Disease-19 Musi Police in the North Rawas Legal Territory, because the village head is the ruler of the village, the main actor is the village head, where the strategy is to manipulate all sectors of society for the benefit of the village community itself.*

**Keywords**: *Implementation, Corona Virus Village, Corona Virus Desease-19*

## PENDAHULUAN

Desa yang menjadi percontohan pertama kampung tangkal Covid-19 di Kabupaten Musi rawas Utara Sumatera Selatan ini adalah Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo. Pembentukan kampung tangkal ini adalah gebrakan nasional, serentak di seluruh Indonesia, "Kampung tangkal yang dimaksud yakni warganya mampu secara mandiri melakukan gotong-royong memutus penyebaran Covid-19. Selain dalam hal pencegahan Covid-19, warga di desa tersebut juga mampu mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini. Artinya pertumbuhan ekonomi di desa tersebut tetap jalan, namun masyarakatnya mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19, desa percontohan pertama, nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lain, target Polres seluruh desa di Muratara menjadi kampung tangkal covid-19.

Tujuan dari pembentukan kampung tangkal ini untuk memotivasi masyarakat dalam rangka menangani wabah covid-19. Terpilihnya Desa Rantau Kadam sebagai desa percontohan pertama karena berbagai pertimbangan dan penilaian beberapa pihak, kemudian sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi seluruh desa yang ada dibentuk juga Kampung tangkal Corona Desa Surulangun. ([https://palembang.tribunnews.com/2020/06/02/desa-rantau-kadam-dipilih-menjadi-kampung-tangkal-covid-19-yang-pertama-di-Kabupaten Muratara](https://palembang.tribunnews.com/2020/06/02/desa-rantau-kadam-dipilih-menjadi-kampung-tangkal-covid-19-yang-pertama-di-Kabupaten-Muratara).)

Berikut data kampung tangkal yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 1. Data Kampung Tangkal Covid-19 Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung Tangkal Covid-19
1.	Rupit	1 Desa
2.	Karang Jaya	2 Desa
3.	Rawas Ilir	1 Desa
4.	Rawas Ulu	1 Desa
5.	Karang Dapo	1 Desa
6.	Nibung	1 Desa
7.	Ulu Rawas	1 Desa
Jumlah		9 Desa

Sumber : Binmas Polres Musi Rawas Utara tahun 2022

Masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan kebijakan kampung tangkal corona virus disease-19 di wilayah hukum kepolisian resort (Muratara), Kurangnya sumber daya manusia sebagai petugas yang menangani masalah virus corona disease-19, jumlah petugas tidak sebanding dengan luasan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada masyarakat mengenai virus corona disease-19.

Tabel 2. Data Petugas Kabupaten Muratara

No	Instansi	Jumlah Personil
1.	Petugas Informasi dan Sosialisasi	4 Orang
2.	Petugas Lapangan	3 Orang
3.	Petugas Pendataan dan Pemetaan Lapangan	5 Orang
Jumlah		12 orang

Sumber : Binmas Polres Musi Rawas Utara tahun 2022

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik mengangkat lebih jauh kedalam bentuk penelitian yang berjudul : Implementasi Kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort Musi Rawas Utara.

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan kampung tangkal corona virus disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Rawas Utara.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Menurut Friedrich (Leo Agustino 2016:16), yang menulis tentang politik sebagai suatu usaha yang selalu berkaitan dengan upaya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Meskipun tujuan atau sasaran tindakan pemerintah tidak selalu mudah dicapai, gagasan bahwa politik melibatkan perilaku yang disengaja merupakan bagian penting dari definisi politik Friedrich.

Eualau dan Prewitt (Leo Agustino 2016:17), yang menyatakan: Praktek adalah “keputusan terus menerus” yang ditandai dengan kesinambungan dan pengulangan (repetisi) dari perilaku pengambil keputusan dan pengambil keputusan. William I. Jenkins (Leo Agustino, 2016:17) juga mencoba menafsirkan kebijakan publik, ia berpendapat bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian keputusan yang terkait”. Dengan kata lain, Jenkins ingin menjelaskan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan yang komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

### **Model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan proses yang menentukan dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah mengimplementasi- kannya. Analisis politik membutuhkan model politik. Model kebijakan ini memudahkan peneliti untuk menentukan indikator yang terukur. Ada beberapa model dalam proses

implementasi kebijakan publik (Agustino 2016:133-152).

Teori Merilee S. Grindle (Leo Agustino 2016:12) tentang keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat kelayakan kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari konten dan konteks kebijakan. politik

1. Content of Policy terdiri :

a) Kepentingan yang Berpengaruh

Mengenai berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, indikator ini menyatakan bahwa harus ada banyak kepentingan dalam implementasi kebijakan dan seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi implementasinya.

b. Manfaat yang diterima.

Pada tahap ini, isi kebijakan mencoba menunjukkan atau menjelaskan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki berbagai manfaat yang menunjukkan dampak positif dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan.

c) Derajat perubahan yang dapat dicapai.

Setiap kebijakan memiliki tujuan yang diinginkan dan ingin dicapai. Pada titik ini saya ingin memperjelas bahwa harus ada skala yang jelas tentang seberapa besar perubahan yang ingin atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan.

d) Tempat pengambilan keputusan.

Dalam politik, pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dalam hal ini perlu dijelaskan dimana pengambilan keputusan dari kebijakan yang dilaksanakan itu berada.

e) Pelaksanaan program.

Dalam mengimplementasikan suatu

kebijakan atau program, harus mendukung implementasi kebijakan yang berkualitas dan kompeten agar kebijakan tersebut berhasil. Itu harus dicatat atau diungkapkan dengan benar di bawah bagian ini.

f) Sarana yang digunakan.

Implementasi kebijakan juga harus didukung oleh dukungan, agar implementasinya berjalan lancar.

Pendapat Donald Van Metter dan Carl van Horn (Leo Agustino 2016:133-136), variabel sumber daya, yaitu keberhasilan proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan ketersediaan personel yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara apolitis. Namun jika kompetensi dan kapasitas sumber daya tersebut nol, maka sangat sulit untuk mengharapkan efektivitas kebijakan publik

1. Konteks kebijakan adalah 3 (tiga) poin, yaitu:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat.

Dalam politik perlu mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan para aktor, kepentingan dan strategi yang diusung oleh implementasi kebijakan tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan seksama, program yang dilaksanakan kemungkinan besar tidak akan jauh dari pembakaran.

b. Karakteristik lembaga pemerintahan dan otoritas administratif.

Lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya, sehingga pada bagian ini kami ingin menjelaskan karakteristik institusi yang juga mempengaruhi kebijakan tersebut.

c. Tingkat kepatuhan dan respon implementasi.

Hal lain yang dianggap penting dalam proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan tanggung jawab para pelaksana. Fase tersebut menjelaskan sejauh mana kepatuhan dan reaksi para pelaksana terhadap praktik tersebut.

Gejala paling umum dari Covid-19 adalah demam 38,0 derajat, batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang melakukan perjalanan ke negara yang terinfeksi atau merawat/berhubungan dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dalam waktu 1 hari sebelum munculnya gejala tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tambahan untuk mengkonfirmasi diagnosis.

Orang yang tinggal atau bepergian ke tempat-tempat penyebaran virus COVID-19 sangat rentan terhadap risiko infeksi. Orang yang terinfeksi adalah mereka yang melakukan perjalanan dari negara yang terinfeksi dalam waktu 1 hari sebelum timbulnya gejala atau yang melakukan kontak dekat, seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien sakit. terjangkit COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 memiliki risiko lebih besar dan harus selalu melindungi diri mereka sendiri dengan

metode pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat.

### **Desa Tangkal Corona**

Desa adalah suatu unit hunian tempat tinggal sekelompok keluarga. Kumpulan dari beberapa desa disebut desa. Kampung merupakan satu-satunya jenis permukiman yang menampung penduduk dengan tingkat ekonomi dan pendidikan terendah di Indonesia, meskipun tidak tertutup bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpendidikan tinggi (KBBI, 2022). Tujuan Kampung Bangsal Corona, masyarakat dapat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan daerahnya, (Cerita Kapolres Malang Hendri Umar 2021) berupa:

1. Memperkuat masyarakat dengan informasi, keterampilan dan kemampuan. bantuan yang memperingatkan bahaya/masalah.
2. Menyebarkan "kisah sukses" untuk memecahkan masalah komunitas sehingga dapat memicu komunitas lain.
3. Memberdayakan setiap pemangku kepentingan membawa keterampilan dan peran yang berbeda untuk pemecahan masalah.
4. Polri berperan sebagai "jembatan" dimana semua pemangku kepentingan berkumpul untuk menyelesaikan masalah.
5. Program pemecahan masalah harus dari bawah, dimulai dari masalah yang menjadi kepentingan masyarakat.
6. Pemecahan Masalah  
Metode SARA (Search Analysis Response Assessment) untuk meningkatkan efisiensi.
7. Memasukkan kearifan lokal dalam pemecahan masalah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. sifat atau jenis data yang dikumpulkan adalah kualitatif, dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tertentu yang dijelaskan dalam kata-kata atau frase yang terpisah untuk menarik kesimpulan. (Sudjana, 2012:65).

### **Definisi Operasional**

1. Content Of Policy
  - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
  - b. Tipe Manfaat
  - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
  - d. Letak pengambilan keputusan
  - e. Pelaksana program
  - f. Sumber daya yang digunakan
2. Context Of Policy
  - a. Kekuasaan kepentingan-kepentingan,
  - b. strategi dari aktor yang terlibat
  - c. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa
  - d. Tingkat kepatuhan dan adanya repon dari pelaksana

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian melalui teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan cara Kompilasi, Reduksi data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Shelter COVID-19 merupakan upaya Polres Musi Rawas Utara untuk menerapkan langkah-langkah kesehatan

dalam pencegahan penyakit. Kegiatan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut pasal 11 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Disease-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, terdapat berbagai dimensi yang dikaji, antara lain mengenai kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara, yaitu Penguatan masyarakat melalui pemberian pengetahuan, ketrampilan, dan pendampingan sehingga terwujud daya tangkal terhadap ancaman/ masalah, Penyebaran “success story” pemecahan masalah komunitas sehingga dapat menjadi pemantik yang dapat dicontoh oleh komunitas lain. Mengenai tipe manfaat dari kebijakan Kampung tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara itu

Tujuan keberadaan Kampung Tangkal tidak hanya untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi juga untuk menekan angka kriminalitas. “Kejahatan dapat ditekan, keamanan dikelola dengan adanya desa Tangkal.

Kelebihan keberadaan desa Tangkal dapat mengajarkan masyarakat untuk hidup bersama dan saling menjaga. Di desa Tangkal juga ada pembagian

kekuasaan, atau tugas di mana ada juga satu kekuatan dengan 1000 orang. misalnya, distribusi keamanan, kebutuhan pangan, kesehatan, kematian, dll. “Jika semua warga berpartisipasi, desa dan desa kita akan kuat ke depan. Termasuk bukti adanya zona biru dalam penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah Muratara, yang tidak semuanya berada di zona merah.

Sumber daya yang digunakan dalam kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara Utara, yaitu sumber daya manusia yang biasa disebut SDM pelaksana yaitu unsur pemerintahan desa, unsur kepolisian dan unsur TNI yang bertugas untuk menjalankan fungsi dari kampung tangkal corona tersebut, sebanyak 8 orang dari tiga pilar yang ada.

Selain SDM juga terdapat sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung dalam kebijakan kampung tangkal corona ini, salah satu yang selalu ada adalah papan pengumuman, yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait informasi pandemi covid 19 dan juga jenis bantuan dan jumlah bantuan yang diterima selama pandemi covid-19 ini.

Anggaran atau dana yang berfungsi untuk mendukung dalam kebijakan kampung tangkal corona ini, didukung oleh anggaran dana desa dan juga donasi masyarakat. Kepala Desa adalah penguasa di desanya maka aktor utamanya adalah kepala desa dimana strateginya adalah mengalakan seluruh sektor yang ada dimasyarakat demi kepentingan masyarakat desa itu sendiri.

Secara garis besar faktor kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa merupakan pendukung dalam program kampung

tangkal corona ini, Dalam hal ini kesediaan masyarakat untuk menerima kebijakan ini dan adanya kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan program kampung tangkal corona, kemudian faktor kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa merupakan pendukung dalam program kampung corona harus dilakukan penguatan-penguatan dalam hal ini kepentingan untuk masyarakat itu sendiri agar dari pendukung yang sudah ada bisa lebih dikembangkan lagi. Khususnya dengan membina dan memberdayakan masyarakat agar dapat sesuai dengan harapan dan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanganan dampak sosial ekonomi covid-19 di desa mereka.

Untuk karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada kebijakan kampung Tangkal. Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara, pemerintah setempat dan masyarakat menyambut baik kebijakan kampung corona ini karena kampung tangkal corona, selain berfungsi sebagai sarana tangkal corona-19 juga berfungsi sebagai pengorganisir segala bentuk bantuan sehingga dapat terkontrol siapa yang menyumbang, berapa jumlahnya, serta siapa saja dalam satu kampung yang telah mendapatkan bantuan. Pada saat bencana bantuan tidak selalu memiliki makna positif tetapi bisa menimbulkan kecemburuan bahkan kerusuhan jika tidak dikendalikan secara sistematis dan adil.

Untuk tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana pada kebijakan Kampung Tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara, untuk tingkat kepatuhan dan respon kepatuhan para

pemegang kebijakan mereka patuh dan merespon dengan baik, karena kebijakan ini melibatkan unsur Kepolisian dan TNI, disini, mereka ada unsur segan dan patuh, kepada pihak kepolisian dan TNI.

Polres dan Pemerintah Kabupaten Muratara menghadirkan inovasi baru yakni Kampung Tangkal Corona. Kampung Tangkal Corona merupakan program dari Bapak Kapolri. Kampung Tangkal Corona adalah suatu tempat pertemuan dari pada tiga pilar yakni kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas. Tiga pilar ini memiliki dua tugas yaitu pertama mendatakan, mendistribusikan sembako baik dari pemerintah maupun bantuan dari Panglima dan Kapolri. Kedua bagaimana penanganan pencegahan covid-19 di wilayah tersebut.

Kampung Tangkal di kawasan Muratara Raya sebagai Kampung Rantau Kadam dapat dijadikan acuan percontohan yang bisa diterapkan oleh desa atau daerah lain untuk mempersiapkan ketahanan pangan di masa COVID-19 sebagai salah satu upaya Kampung Tangkal mencegah penyebaran COVID-19. Sebuah virus -19. Desa ini menerapkan beberapa protokol yang diadopsi oleh masyarakat setempat untuk menghadapi wabah atau bencana. Di Kampung Tangka sendiri, peran masyarakat adalah membantu pemerintah mencegah penyebaran covid-19, sehingga bisa meminimalisir penyebaran covid-19, agar pandemi covid-19 ini segera hilang, agar semuanya bisa . menjadi steril lagi. sebelum

Dalam penelitian ini, Kampung Tangkal pertama terletak di Desa Rantau Kadam, Wilayah Muratara, Sumatera Selatan, dan menarik perhatian

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk memastikan kesiapan Desa Pendem untuk menerapkan Tangkal. Desa dan pemberantasan COVID-19, selain pemangku kepentingan seperti Kapolda Sumsel datang berkunjung ke lokasi Desa Tangkal Corona yang melaksanakan Desa Tangkal, ikut memantau kendala dan kesenjangan, serta menilai sudah berapa lama pelaksanaannya.

Desa Tangkal telah melindungi warganya dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Tujuan didirikannya Desa Tangguh adalah untuk mencegah virus corona masuk ke wilayah desa, dan jika tidak ada penularan disebut desa bebas virus corona. mencegah penyebaran virus mematikan ini. "Kalau desa atau kecamatan tanpa mahkota, otomatis kasus bisa ditekan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, bahkan dihilangkan. Itu saja, peran penting pengurus kabupaten dan RT bukan hanya posisi desa, tetapi desa yang kuat dapat membantu mengurangi resiko bencana Hal ini dapat dilakukan dengan faktor, ancaman, perubahan nilai kerentanan dan peluang Resiko rendah/rendah jika :

1. Ancaman dikurangi, dihindari atau dihilangkan
2. Kerentanan berkurang
3. Kemampuan ditingkatkan. Ada berbagai ancaman yang dapat dicegah atau dihilangkan, seperti epidemi.

Untuk satu jenis bahaya, ada juga bentuk pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Dari ketiga poin di atas dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu

dilakukan untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh segala sesuatu, jadi yang terpenting adalah tindakan dan kesadaran kita sendiri, tanpa tindakan dan kesadaran akan harapan dan keinginan. untuk menghindari malapetaka atau harapan, yang hanya bisa meminimalisir efek angan-angan tanpa mengubah fakta sedikit pun.

Diharapkan juga menerapkan fleksibilitas dengan desa pertempuran mahkota ini. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang kesehatan, termasuk Covid-19, bisa ada desa-desa pendukung, polisi dan pemerintah terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19, antara lain dengan memberikan vaksin dan bekerja sama dengan TNI. . /Polri, selain terus menyiapkan rumah sakit dan juga puskesmas bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, agar tidak ada sengat seperti beberapa bulan lalu. Pemerintah bersama kepolisian membuat gebrakan di Desa Tangkal Corona untuk mengajarkan masyarakat yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan kampung tangkal corona virus disease-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara dalam kategori baik, hal ini dikarenakan untuk masing-masing dimensi dan masing-masing indikator seperti Content Of Policy mengenai tipe manfaat dari kebijakan kampung tangkal corona virus disease-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Rawas Utara. yaitu keberadaan kampung tangkal tak hanya untuk menekan penyebaran virus korona, namun juga berdampak pada penurunan kriminalitas. "Tindak

kriminalitas dapat ditekan, keamanan terkontrol dengan adanya kampung tangkal ini. Tipe manfaat keberadaan kampung tangkal dapat melatih masyarakat untuk hidup gotong royong dan saling peduli, jika konsep seperti ini dijalankan terus, maka situasi kamtibmas di wilayah Musi Rawas Utara akan tetap aman dan kondusif dan di dalam kampung tangkal juga ada divisi atau satgas, misalnya divisi keamanan, kebutuhan pangan, kesehatan, kematian, dan sebagainya.

Penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah yang ada di Musi Rawas Utara zonannya biru semua tidak masuk zona merah. Selanjutnya derajat perubahan yang ingin dicapai dari kebijakan kampung tangkal Corona Virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, yaitu program kampung tangkal corona-19 sangat berdampak bagi proses pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, dimasa pandemi ini akses kita dibatasi sehingga perlu dilakukannya perubahan dimasyarakat terutama perubahan cara dan tatacara kebiasaan sehari-hari serta pola hidup sehat.

Indikator Context Of Policy kekuasaan kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat pada program kampung tangkal corona virus Disease-19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara, karena

Kepala Desa adalah penguasa di Desanya maka aktor utamanya adalah Kepala Desa dimana strateginya adalah mengalikan seluruh sektor yang ada di masyarakat demi kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Secara garis besar faktor kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa merupakan pendukung dalam program

kampung tangkal corona ini, karena berasal dari lingkungan Desa itu sendiri yaitu SDM, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini kesediaan masyarakat untuk menerima kebijakan ini dan adanya kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan program kampung tangkal korona, kemudian faktor kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa merupakan pendukung dalam program kampung korona harus dilakukan penguatan-penguatan dalam hal ini kepentingan untuk masyarakat itu sendiri agar pendukung yang sudah ada bisa lebih dikembangkan lagi khususnya dengan membina dan memberdayakan masyarakat agar dapat sesuai dengan harapan dan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanganan dampak sosial ekonomi covid-19 di desa mereka. Untuk karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada kebijakan kampung tangkal corona virus disease-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muratara, pemerintah setempat dan masyarakat menyambut baik kebijakan kampung corona ini karena kampung tangkal corona, selain berfungsi sebagai sarana tangkal corona-19 juga berfungsi sebagai pengorganisir segala bentuk bantuan sehingga dapat terkontrol siapa yang menyumbang, berapa jumlahnya, serta siapa saja dalam satu kampung yang telah mendapatkan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Abiding, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika.
- AKBP Hendri Umar. 2021. Paparan Kampung Tangguh Menangkal Covid-19. Malang

- Arikunto, Suharsimi, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Catatan ke II, Jakarta : Rineka Cipta
- Askan Arifin. 2021. *Tesis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Smp Islam Al Azhar Ii Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musirawas)*. Program Pascasarjana (PPS) Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Aurick Yudha, dkk. 2020. *Pedoman Pengoperasian Kampung tangkal Langkah Sistemik Melawan Pandemi Covid 19*. SATGAS Covid 19 UB Gedung Rektorat Lantai I Universitas Brawijaya Jln. Malang, Jawa Timur.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Catherine Dwi Augusthi Putri. 2021. *Tesis Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu*
- Sudjana, Nana. 2012. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Waluyo, Pohan. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jatim : Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Toeri, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : MediaPressindo.
- Yuliana. 2020. *Tesis Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.